



TERLALU MAHAL! HARGA STAN BERAU EXPO BIKIN PEDAGANG BUNTUNG



**BERAU DAPAT KUOTA BEASISWA
PIP, SYARIFATUL: SEMOGA
BERMANFAAT UNTUK KEDEPANNYA**



Para pelaku UMKM dibuat keberatan dengan harga sewa tenda yang ditetapkan oleh EO Berau Expo 2023.

TERLALU MAHAL! HARGA STAN BERAU EXPO BIKIN PEDAGANG BUNTUNG

TANJUNG REDEB - Pagelaran Berau EXPO yang merupakan rangkaian hari jadi Kota Tanjung Redeb dan Kabupaten Berau kembali digelar tahun 2023 ini. Sayangnya, ditemukan kejanggalan dalam acara tersebut, yakni diduga adanya praktik “perdagangan” oleh oknum Event Organizer (EO).

Diketahui, pelaku UMKM atau pedagang yang ingin berdagang dalam perhelatan Berau EXPO yang digelar 1 hingga 10 November 2023 dipungut biaya, alias tidak gratis. Padahal, pameran dagang tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah seorang pelaku UMKM Berau, Burhan membeberkan bahwa nominal sewa stan yang ditetapkan pihak penyelenggara sangat mahal. Disebutnya pedagang harus merogoh kocek sekisar Rp 5 hingga 7 juta ke oknum EO.

“Padahal ini dibiayai APBD, tetapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Harga stan itu sesuai ukuran tenda, tetapi menurut saya harga yang ditetapkan sangat mahal,” tuturnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Burhan, harga yang dipatok tidak masuk dalam prof-

it, jika dihitung-hitung berdasarkan bisnis. Sebab, pemasukan yang didapat tak setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

“Jadi kami bukan untung jika jualan di acara Berau EXPO itu, tetapi buntung,” tegasnya.

Dia memaparkan, harga stan paling murah adalah Rp 5 juta untuk waktu sewa selama 10 hari. Sehingga, pedagang harus meraup cuan diatas Rp 500 ribu per harinya.

“Itu belum dikurangi dengan biaya operasional dan membayar pegawai. Tentunya harga itu membuat kami sangat keberatan, jika harga produk yang kami jual dinaikkan, nantinya kami disebut memanfaatkan momen,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Burhan, perhelatan Berau EXPO 2023 yang dianggarkan sekisar Rp 3 miliar itu hanya diperuntukkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memamerkan dan mendemonstrasikan produk serta layanan terbaru mereka.

“Tetapi malahan untuk kami para pedagang, setiap stan memang tetap diadakan, tetapi biayanya dibebankan kepada kami.

Saya nilai konsep seperti ini justru berbanding terbalik,” imbuhnya.

Seharusnya, kata Burhan, dengan anggaran sebesar itu para pelaku UMKM dipermudah. Bila perlu stan gratis. Apalagi, event ini merupakan rangkaian dari Hari Jadi Tanjung Redeb dan Kabupaten Berau.

“OPD dibuat enak, masyarakat disusahkan dengan harus membayar,” sebutnya.

Hal serupa juga diutarakan Ketua Komunitas Ikan Hias Berau, Arie Pramana Putra. Dia bersama komunitasnya berencana ikut berpartisipasi dalam pagelaran tersebut dengan memamerkan ikan hias. Tapi rencana itu batal. Besarnya biaya dikeluarkan untuk biaya sewa stan mengurungkan niatnya.

“Mahal Banget, enggak jadi ikut. Kalau hitungan bisnis enggak masuk,” tandasnya.

Sementara panitia atau EO Berau EXPO 2023, Morten enggan menjawab saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait pedagang harus membayar stan Berau EXPO 2023.

“Saya izin dulu ke dinas. Kalau mereka (dinas) sudah kasih izin, nanti kami jawab,” ucapnya. (dez)



Foto bersama para pelajar dengan Hetifah dan Syarifatul Syadiah.

BERAU DAPAT KUOTA BEASISWA PIP, SYARIFATUL: SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KEDEPANNYA

TANJUNG REDEB—Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Sri Kumalasari mendampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudien berkunjung sekaligus secara simbolis memberikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para penerima dari berbagai tingkatan sekolah, di SMAN 2 Berau.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudien telah menyerahkan sebanyak 15.000 kuota beasiswa PIP bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Berau. Yang terbagi menjadi gelombang pertama 10.000 kuota dan kedua sebanyak 5.000 kuota.

Beasiswa tersebut ditargetkan untuk mendorong minat belajar dan membantu kelancaran pendidikan bagi pelajar yang menerimanya. Apalagi Berau masuk dalam KSPN sehingga perlu memiliki SDM yang unggul di bidang akademik.

"Tadi saya sudah menden-
gar usulan dan masukan terkait beasiswa PIP, tentunya menjadi

catatan khusus untuk menja-
di bahan evaluasi ke depannya,"
terang Hetifah.

Meski saat ini pendidikan su-
dah gratis, namun diakuinya ke-
butuhan pendukung pembelaja-
ran tetap perlu dipenuhi secara
pribadi. Sehingga melalui bea-
siswa tersebut diharapkan dapat
membantu penerima yang
membutuhkan.

"Saat ini kami juga tengah be-
rupaya mempercepat pencairan
beasiswa PIP untuk Berau. Kita juga
akan dorong perbankan untuk jem-
put bola ke pelajar yang jauh dari
akses menuju perbankan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama,
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syari-
fatul Syadiah mengatakan, dirinya
mewakili DPRD Berau berterima
kasih kepada Wakil Ketua Komisi
X DPR RI, Hetifah Sjaifudien yang
berkenan turun langsung ke Daer-
ah Pemilihan (Dapil), khususnya di
Kabupaten Berau.

"Ini merupakan bentuk perha-
tian yang diberikan kepada kita,
khususnya pemberian beasiswa
bagi pelajar di Kabupaten Berau,"

ungkapnya.

Ia pribadi juga mengapresia-
si perhatian yang diberikan se-
bagai bentuk kepedulian terha-
dap dunia pendidikan melalui
beasiswa PIP tersebut. Mas-
yarakat yang menginginkan
anaknya mendapatkan beasiswa
bisa mengusulkan melalui per-
wakilan rakyat, yakni Hetifah.

"Kami dari DPRD Berau men-
gucapkan banyak terima kasih
kepada Ibu Hetifah yang mem-
berikan aspirasinya berupa bea-
siswa untuk siswa-siswi di Bumi
Batiwakkal," ucapnya.

Syarifatul berharap, anak-anak
di Kabupaten Berau tidak ada
lagi yang tidak bersekolah atau
sampai putus sekolah. Pasalnya,
pemerintah tidak memungut bi-
aya apapun untuk sekolah. Yang
ada malah memberikan bea-
siswa berupa PIP ini.

"Semoga para pelajar di Be-
rau kelak menjadi generasi yang
membanggakan orangtua dan
membawa nama baik sekolah
hingga sukses di masa yang akan
datang," harapnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

ALAT PENYEDOT LUMPUR, DINILAI KURANG EFEKTIF ATASI BANJIR

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti alat penyedot lumpur yang baru saja didatangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Ia menilai, alat tersebut kurang efektif dalam menanggulangi masalah banjir di daerah perkotaan di Bumi Batiwakkal.

Dijelaskannya, persoalan banjir diakibatkan dari tidak terkoneksinya drainase yang ada di kawasan perkotaan. Sehingga, ketika terjadi hujan dengan curah yang tinggi, menyebabkan debit air meluap.

"Saya luruskan ya, banyak juga kritikan dari masyarakat, bahwa untuk apa drainase dibangun kok tetap banjir. Masterplan kita ini terkait perencanaan drainase itu pun belum tuntas," singgungnya.

Untuk itu, ia mengimbau, dari pada membeli alat penyedot lumpur, lebih baik Pemkab Berau, lebih memfokuskan pembangunan drainase untuk mencegah genangan air yang meluap ketika turun hujan.

"Kecuali kalau itu (drainase, red) sudah tuntas, semua sudah terkoneksi, lalu tiba-tiba banjir lagi dalam waktu turun hujan satu hari, berarti ada kesalahan dalam perencanaannya,"

imbuhnya.

Menurut Madri, penanganan banjir perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya bergantung pada pemerintah saja.

"Kalau ini masih belum terkoneksi, masih terputus, masyarakat juga akan sadar tentang kebersihan. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita, jangan sampai tersumbat," pintanya.

Dirinya mengajak, seluruh masyarakat untuk menggalakkan gotong-royong guna menjaga lingkungan terhindar dari banjir.

"Gotong-royong itu yang perlu kita tingkatkan. Alat itu bukan di atas segala-galanya, tapi tentang kesadaran masyarakat tentang kebersihan," tuturnya.

Ia berharap, masalah banjir bisa segera ditangani. Hal ini berdasarkan masterplan yang telah disusun oleh pihak eksekutif. Namun, sementara itu, masyarakat juga harus mengerti tentang lingkungannya sendiri.

"Dengan adanya kesadaran tentang kebersihan, penumpukan sampah, pasir maupun lumpur di gorong-gorong bisa dituntaskan. Kalau alat hanya satu bagaimana mau mem-backup keseluruhan drainase yang tersumbat," tandasnya. (adv/set)



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno.

DORONG PENAMBAHAN FASILITAS BELAJAR SD 001 SEGAH

TANJUNG REDEB - Sektor pendidikan merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian maksimal. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno mendorong pemerintah untuk menambah fasilitas belajar di SD 001 Gunung Sari, Kecamatan Segah.

Dia mengungkapkan, anggaran pendidikan sangat besar, tetapi masih terdapat kekurangan terhadap sarana penunjang. Maka dari itu, harus ada perhatian khusus dari pihak terkait.

"Jangan dulu membahas soal kualitas pendidikan, tapi tolong penuhi sarana dan prasarana penunjangnya. Bagaimana pendidikan kita mau berkualitas kalau sarana penunjangnya saja masih belum maksimal," ujarnya.

Akibat kurangnya kursi di sekolah tersebut, aktivitas belajar mengajar saat ini belum dapat berjalan maksimal. Lanjutnya, ada tiga ruangan di sekolah tersebut yang telah dibangun sejak 2022 lalu, namun ketersediaan kursi hingga saat ini menjadi kendala untuk difungsikannya ruangan tersebut.

"Keluhan itu belum diakomodir pemerintah. Saya berharap apa yang menjadi keluhan terkait pendidikan ini bisa diprioritaskan," tegasnya.

Selain itu, Suharno juga meminta instansi terkait memperhatikan sarana prasarana lain yang masih kurang, agar keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau bukan hanya sekadar wacana. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

BERDAMPAK KE PSIKOLOGIS, MINTA JUDI ONLINE DIBERANTAS

TANJUNG REDEB – Praktik judi online yang saat ini masih marak dilakukan masyarakat menarik perhatian berbagai pihak, tak terkecuali jajaran legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengungkapkan, mengenai praktik judi online tersebut, harus ada pengawasan maksimal dari pihak terkait.

“Karena dampak dari judi online ini sangat berbahaya dan luas, bisa menyerang psikologis seseorang dan sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, judi online telah menyumbang angka perceraian di Kabupaten Berau, yakni mencapai 200 kasus. Sehingga dampak yang ditimbulkan sangat buruk. “Artinya banyak masyarakat Berau yang mengakses situs-situs judi online tersebut. Kita khawatir, dampaknya juga akan merambat kepada perbuatan kriminalitas,” tuturnya.

Dia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau memperhatikan

maraknya praktik judi online tersebut, sebab memicu persoalan privasi warga yang akan berdampak luas. “Saya kira sebagai upaya pencegahan maraknya praktik judi online ini, harus ada pengawasan teknologis,” ujarinya.

Ditegaskan Falen, Diskominfo Berau harus aktif mengawasi situs-situs perjudian. Jangan sampai, kata dia, masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. “Kita tidak ingin, akibat dampak buruk dari judi online ini bisa melahirkan masalah-masalah sosial baru,” imbuhnya.

Kendati demikian, politikus Demokrat ini mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. “Sebaiknya lebih bijak memilih apa yang sebaiknya dilakukan dengan teknologi yang semakin maju. Dampaknya sangat banyak sekali, bahkan turunan dampaknya pun lebih banyak lagi,” tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

DORONG PEMERINTAH ENTASKAN PEMUKIMAN KUMUH

TANJUNG REDEB - Masih belum tuntasnya persoalan pemukiman kumuh di Berau menjadi sorotan jajaran legislatif. Sebab ke depannya akan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menuturkan, pemerintah harus mengkaji ulang penataan pemukiman, tentunya merujuk pada Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

"Masih ada beberapa titik pemukiman kumuh yang perlu mendapat perhatian. Harusnya bisa diselesaikan untuk mempersiapkan

daerah kita menjadi lebih tertata," ungkapnya.

Sementara itu, menyinggung terkait anggaran penataan ulang perumahan kumuh, dikatakan Elita, hal tersebut masih dalam proses pembahasan.

"Saya belum bisa pastikan apakah anggaran penataan ulang pemukiman kumuh ini ada di APBD 2024 atau tidak, masih menunggu usulan dari Pemkab. Yang pastinya kami sebagai anggota Komisi II sangat mendukung jika memang pemerintah mengadakan penataan ulang kawasan kumuh," tandasnya. (adv/set)



DISDIKPORA PPU DAN BLK KOMUNITAS GELAR PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TATA KECANTIKAN RAMBUT



**TERIMA KELUHAN SOPIR YANG
KESULITAN BBM, PEMKAB PPU BAKAL
BENTUK PENGAWASAN DI SPBU**



Kepala Disdikpora PPU Alimuddin saat pembukaan pelatihan. (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

DISDIKPORA PPU DAN BLK KOMUNITAS GELAR PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TATA KECANTIKAN RAMBUT

PPU - Ada sebanyak 30 warga lokal Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti pelatihan kewirausahaan tata kecantikan rambut. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU dalam hal ini bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dikelola oleh Yayasan Aulia Utama Humairoh.

Para peserta itu ialah para pemuda yang tersebar di empat kecamatan yang ada di PPU. Mereka akan mengikuti kegiatan pelatihan di workshop yang berada di Kecamatan Waru selama 5 hari, mulai 24-29 Oktober 2023.

Kepala Disdikpora Alimuddin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peluang dalam mengembangkan potensi, kemudian juga keterampilan yang mereka miliki dan menangkap peluang dari pindaunya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini sebuah peluang. Gunakan kesempatan untuk belajar. IKN Nusantara sebentar lagi jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri," katanya.

Dengan adanya pelatihan keterampilan tata kecantikan rambut, diharapkan mereka dapat memiliki keterampilan khusus. Yang mana skill itu nantinya bisa memberikan

keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Itu yang dapat menjadi modal untuk memulai usaha mandiri di bidang kecantikan atau memperoleh pekerjaan di salon-salon kecantikan," jelas Alimuddin.

Sementara itu Ketua Yayasan Aulia Utama Humairoh Dessy Purwito Sari mengatakan bahwa pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peserta dengan keterampilan baru. Peserta dapat memiliki skill di bidang kecantikan rambut diperlukan dalam berwirausaha.

"Materi yang diberikan sangat bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk bekerja atau membuka usaha," kata Dessy yang juga Owner LPK DESY SALON.

Dia juga berharap dalam menyambut IKN putra daerah harus berperan aktif dalam pembangunan. Mereka harus aktif dan bisa bekerja dan mampu bersaing sesuai dengan skill yang mereka miliki khususnya di bidang kecantikan rambut.

"Alhamdulillah kita sudah memiliki ratusan alumni yang dilatih dalam bidang tata kecantikan rambut sejak 2016 binaan Yayasan Aulia Utama Humairoh," pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menerima keluhan para sopir, Rabu (25/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

TERIMA KELUHAN SOPIR YANG KESULITAN BBM, PEMKAB PPU BAKAL BENTUK PENGAWASAN DI SPBU

PPU - Puluhan sopir truk di Penajam Paser Utara (PPU) menemui langsung Pj Bupati PPU, Makmur Marbun Rabu, (25/10/2023). Mereka meminta solusi atas kondisi sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Penajam.

Khususnya BBM jenis solar di SPBU Kilometer 9 Nipah-Nipah. Koordinator sopir truk PPU, Ibrahim mengungkapkan persoalan tersebut sudah terjadi cukup lama.

"Bahkan beberapa kepala daerah sebelumnya dinilai belum ada yang bisa memberikan solusi yang memuaskan terhadap persoalan ini," ujarnya.

Dalam kondisi itu, tak jarang sopir truk mengantre di SPBU sejak malam hingga pagi hari. Hal ini bisa dilihat hampir tiap hari terdapat pemandangan antrean yang mengular ratusan meter.

"Namun ketika pagi harinya solar yang diinginkan juga tidak bisa diperoleh dengan alasan dari pihak SPBU solar telah habis. Tapi kita juga tidak tahu kemana larinya itu. Tolong kalau bisa ada pengawasan dalam pendistribusian BBM disana," jelas Ibrahim.

Sementara diketahui jatah BBM jenis solar yang masuk di SPBU itu saat ini dinilai cukup. Yakni sebanyak 16 ton dan diperkirakan sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat PPU.

"Jadi ini sudah masuk 16 ton per hari. Seharusnya jumlah itu untuk 2 ratus mobil. Tetapi faktanya, ketika antrian 16 truk itu sudah habis solar nya. Kemana? Berarti SPBU bermain,"

bebernya.

Ibrahim juga berharap bahwa pihak SPBU agar bisa menambah kuota BBM jika memang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat PPU. Tetapi jika memang para sopir truk tidak bisa membeli di SPBU pihaknya bisa diberi fasilitas oleh pemerintah khusus untuk para sopir dum truk seperti halnya nelayan yang ada di PPU.

"Makanya kita minta kepada pemerintah daerah melalui bapak Pj bupati PPU pada hari ini untuk memberikan fasilitas ke kami para sopir truk ini," tandas Ibrahim.

Menanggapi keluhan puluhan sopir truk tersebut, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan ini. Namun ia meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Saya segera akan bicarakan ini bersama Kapolres, Dandim dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Beri saya waktu," katanya.

Ia menegaskan hal ini memang sudah masuk dalam salah satu konsentrasinya untuk diselesaikan. Adapun upaya untuk memonitoring itu, dalam waktu dekat ia akan meminta ada pengawasan pemerintah di SPBU tersebut.

"Ke depan ada pengawasan selama 24 jam di SPBU khususnya dari pihak Satpol-PP PPU. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU telah sesuai dengan ketentuan," tutup Makmur. (ADV/SBK)



Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin. (Robbi/MediaKaltimGroup)

REHABILITASI SDN 009 PETUNG, DISDIKPORA PPU USULKAN RP 10 M

PPU - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan peningkatan fasilitas SD Negeri 009 pada 2024. Anggaran yang dibutuhkan dalam merehabilitasi SD di Petung itu mencapai Rp 10 miliar.

Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin menuturkan pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran tersebut pada 2024. Selain untuk rehabilitasi gedung, juga untuk pengadaan meja dan kursi belajar.

"Rehab SD Negeri 009 akan dilakukan pada tahun anggaran 2024 dan anggarannya sudah diusulkan," ujarnya, Rabu (25/10/2023).

Untuk diketahui, Disdikpora PPU pada tahun ini melakukan rehabilitasi SD Negeri 026 yang ada di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam. Dengan perencanaan bangunan gedung dua lantai.

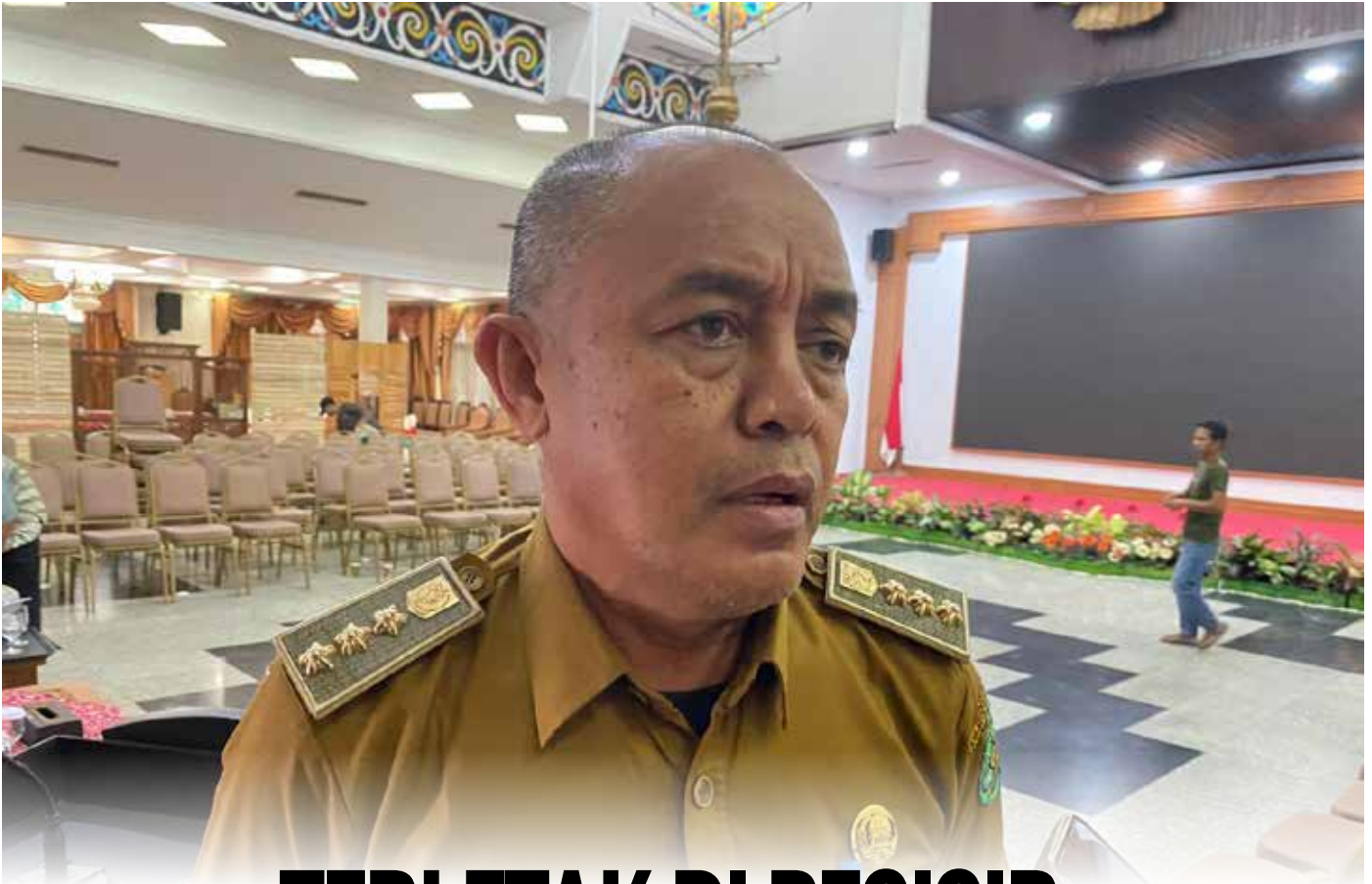
Rencananya, rehabilitasi yang akan dilakukan di SD Negeri 009 ini dibangun sama den-

gan di SD Negeri 026 Penajam. Jadi, sebagian bangunan lama bakal dirobohkan dan sebagian bangunan tetap dipertahankan.

"Sekolah langsung bisa difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar setelah rehabilitasi selesai," ungkapnya.

Adapun kemajuan rehabilitasi SD Negeri 026 sampai saat ini telah melampaui sekitar 50 persen dan pengerjaan fisik dapat selesai sesuai target yang ditetapkan. Rehabilitasi SD Negeri 026 di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam itu bersumber dari APBD 2023 Kabupaten PPU sekitar Rp15,5 miliar.

Anggaran itu untuk rehabilitasi bangunan menjadi dua lantai, dilengkapi ruang kelas belajar, ruang kepala sekolah, perpustakaan, UKS (unit kesehatan sekolah), musala, kamar mandi (toilet), dan mebel. "Ditargetkan rehabilitasi SD Negeri 026 selesai tahun ini, difungsikan pada 2024," tutup Alimuddin. (ADV/SBK)



TERLETAK DI PESISIR, PETENSI HASIL LAUT KECAMATAN SAMBOJA MELIMPAH



**KECAMATAN SANGASANGA
DIPROYEKSIKAN BAKAL JADI
KAWASAN PETERNAKAN**



Camat Samboja, Damsik. (Ady/Radar Kukar)

TERLETAK DI PESISIR, PETENSI HASIL LAUT KECAMATAN SAMBOJA MELIMPAH

TENGGARONG - Sebagai salah satu wilayah yang terletak di daerah pesisir, Kecamatan Samboja punya potensi besar di sektor perikanan dan rumput laut. Bagaimana tidak, hampir seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja terletak persis di bibir pantai.

Camat Samboja, Damsik, mengatakan hanya ada beberapa desa dan kelurahan yang tidak berhadapan langsung dengan pantai. Hal ini menjadikan potensi ikan dan rumput laut dari Kecamatan Samboja sangat melimpah.

"Mulai dari Kelurahan Tanjung, Kelurahan Kuala, Pamedas sampai ke Muara Sembilang itu semua di bibir pantai dan penghasil ikan yang terbesar di daerah-daerah itu, termasuk juga pembudidayaan rumput laut," papar Damsik, Rabu (25/10/2023).

Bahkan selama ini, ikan laut hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Samboja, didistri-

busikan untuk memenuhi kebutuhan ikan beberapa kota besar di sekitarnya. Seperti Samarinda, Balikpapan dan termasuk Tenggara.

Sejak masa lalu, mayoritas masyarakat di Kecamatan Samboja sudah bergantung hidupnya dari hasil melaut. Damsik mengatakan, taraf kesejahteraan masyarakat Samboja juga berpotensi meningkat. Dengan dibangunnya pabrik pengolahan rumput laut di Kecamatan Muara Badak.

"Jadi selain nelayan tangkap ikan, banyak juga pembudidaya rumput laut di Samboja. Nah dengan pembangunan pabrik rumput laut di Muara Badak ini kan bisa memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya. Pabrik itu sudah sangat kami nantikan," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Sangasanga, M Dachriansah. (Ady/Radar Kukar)

Kecamatan Sangasanga Diproyeksikan Bakal Jadi Kawasan Peternakan

TENGGARONG - Banyaknya lahan pasca tambang, dimanfaatkan Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai kawasan peternakan sapi. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan diri untuk menjadi daerah penghasil daging bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Camat Sangasanga, M Dachriansah, mengatakan ide memanfaatkan lahan pasca tambang menjadi kawasan peternakan ini, terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (EMAS) di Kecamatan Tenggarong Seberang.

"Rencana awal adalah ternak sapi, jadi memang untuk kebutuhan Kalimantan Timur, memang secara teknisnya kami ingin mengembangkan itu. Sebagai upaya mem-

persiapkan kebutuhan daging bagi IKN nantinya," terangnya.

Rencananya, akan ada tiga titik lokasi yang bakal jadi lokasi fokus (lokus) pengembangan ternak sapi. Yakni di Kelurahan Sangasanga Muara, Sangasanga Dalam dan Kelurahan Pendingin. "Tahap awalnya sudah dimulai dan akan ditindaklanjuti lagi setelah 2025," tambahnya.

Pada tahap awal ini, Dachriansah mengatakan pihaknya akan menggandeng pihak swasta, untuk melakukan pengembangan. "Mudah-mudahan bisa terealisasi. Artinya Sangasanga bisa menjadi pemasok kebutuhan daging bagi Kaltim dan IKN," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kades Loh Sumber, Sukirno (Istimewa)

BUMDes Sumber Purnama Milik Desa Loh Sumber Gaet Desa Lain untuk Tingkatkan Produksi Beras

TENGGARONG – Fokus pengembangan sektor pertanian, Pemerintah Desa (Pemdes) Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, sukses memproduksi beras siap konsumsi yang mampu bersaing di pasaran.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Purnama yang bergerak di sektor pertanian. Hilirisasi produk pertanian khususnya padi, dikelola dengan mesin modern. Yaitu Rice Milling Unit (RMU) dan termasuk juga mesin pengering.

Dengan peralatan canggih tersebut, BUMDes Sumber Purnama mampu memproduksi 25 ton beras per bulannya. Beras hasil produksi BUMDes Sumber Purnama dijual ke pasaran dengan nama Beras Cap Tugu.

Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno, mengatakan upaya pengembangan sektor pertanian ini terus dilakukan pihaknya. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjadikan Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami ingin Beras Cap Tugu ini bisa tampil, yakni dijual ke ritel modern. Saat ini sendiri izinnya dari provinsi sudah keluar, bersamaan dengan kemasan baru," katanya.

Untuk mewujudkan hak tersebut, Sukirno

juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki program Sinar Purnama. Yaitu program pembinaan dan pemberdayaan petani, dengan memberikan pinjaman modal hingga asuransi.

Dengan program ini, diyakini produktifitas BUMDes Sumber Purnama bisa meningkat pesat. Namun juga pihaknya menghadapi kendala, yakni masalah minimnya lahan pertanian di Desa Loh Sumber. Sukirno mengatakan, program ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari desa lain. Agar BUMDes Sumber Purnama bisa terus mendapatkan suplai gabah dan diolah menjadi beras.

"Ini kita coba kerjasama dengan Desa Benua Puhun, disana ada 100 hektare lahan pertanian. Agar bekerjasama dengan kami untuk mengembangkannya," tambah Sukirno.

"Kami berharap Pemkab Kukar juga ikut membantu sepenuhnya dengan pendampingan hingga pemasaran. Kami ingin meningkatkan sektor pertanian dengan mencintai produk lokal. Dan kami ingin terlibat dalam mendorong sektor pertanian ini," tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



SURANTO RESMI GANTIKAN RONNY SEBAGAI KALAPAS KELAS II A BONTANG

BACA HALAMAN A2

a

**BANK DARAH RSUD BONTANG,
LAYANI TRANSFUSI 150
KANTONG SETIAP BULANNYA**





Lepas sambut Kepala Lapas Kelas II A Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

Suranto Resmi Gantikan Ronny Sebagai Kalapas Kelas II A Bontang

BONTANG - Lepas sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Bontang dilaksanakan Rabu (25/10/23) di Lapas Bontang, Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari.

Ronny Widiyatmoko, Kalapas Kelas II A Bontang resmi dipindah tugaskan ke Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung Jawa Barat setelah menjabat selama 3 tahun 10 bulan lamanya.

Ia resmi digantikan oleh Suranto yang sebelumnya bertugas di Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham. Suranto berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.

Ronny mengatakan, bahwa lapas di Bontang memiliki Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terbanyak di Kaltimara, sehingga perlu adanya tambahan petugas.

Diketahui terdapat 1.738 WBP, sehingga kalapas baru harus mengemban tanggung jawab besar agar kondisi lapas tetap kondusif.

"Bila melihat jumlah isi lapas di Kota Bontang ini cukup banyak, namun kondisinya tetap kondusif," katanya

Suranto mengatakan, nantinya diharapkan akan ada sinergitas untuk membimbing WBP, karena nantinya mereka akan kembali ke masyarakat sehingga pembinaan harus dilaksanakan dengan bantuan seluruh stakeholder, forkopimda, serta pemerintah daerah.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan mereka apalah kita," ujarnya.

Kurangnya tenaga kesehatan serta penjaga WBP menjadi koreksi untuk segera ditambahkan, "Karena saya baru dua hari di sini, saya akan keliling dan memastikan apa yang harus dibenahi di lapas ini, kami akan bekerja dengan baik," jelasnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva alam



Kegiatan refreshing kader lansia tingkat Kota Bontang, di Auditorium 3 dimensi. (dwi)

Dinkes Adakan Refreshing Kader Lansia

BONTANG - Refreshing Kader Lansia Tingkat Kota Bontang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lansia Nasional yang jatuh pada 29 Mei setiap tahunnya, serta Hari Lansia Internasional setiap 1 Oktober. Kegiatan ini berlangsung Rabu (25/10/2023) di Auditorium 3 Dimensi.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati menyampaikan di peringatan hari lanjut usia tahun ini, bahwa kegiatan kali ini bertema "Lansia Sehat Indonesia Bermartabat." Dari tema tersebut, maka diambil subtema "Keluarga Hebat, Caregiver Bersahabat, Lansia Smart (sehat, produktif, dan mandiri), Mari Peduli Lansia Menuju Lansia Sejahtera dan Bermartabat."

"Ini sangat berkaitan dengan tugas dinas kesehatan dalam upaya meningkatkan promotif, preventif, dan rehabilitatif. Agar lansia tetap memiliki peran dan tetap eksis," ungkapnya.

Menjadi lansia adalah suatu kepastian bagi yang masih dewasa muda, untuk saat ini jumlah lansia di Indonesia adalah 27,1 juta jiwa (hampir 10 persen populasi) dan pada 2025 diproyeksikan menjadi 33,7 juta jiwa.

"Untuk di Kota Bontang sendiri, meski jumlah penduduk lansianya belum

memasuki Era Ageing Population, penduduk lansia mencapai 4,8 persen pada 2020. Namun upaya dan perhatian kota terhadap kualitas hidup lansia tetap menjadi perhatian," bebernya.

Peningkatan jumlah lansia dengan berbagai permasalahan kesehatan menjadi tantangan, untuk mempersiapkan lansia sehat dan mandiri agar dapat meminimalisasi bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan lansia sehat bermartabat, diperlukan upaya sejak dini, sesuai dengan siklus hidup manusia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, seperti program pemberian "Rantang Kasih" bagi lansia yang kurang mampu.

"Peran kader di masyarakat adalah sebagai ujung tombak dalam upaya membantu peningkatan peran lansia, pemberdayaan, kepedulian, dan juga edukasi bagi keluarga serta masyarakat," ucapnya.

Aji Erlynawati menambahkan, jika lansia seharusnya tidak dipandang sebagai manusia yang menjadi beban keluarga atau beban pembangunan. Sudah saatnya lansia menjadi pemimpin utama dalam memberikan nasihat dan imbauan, agar anak cucu mereka melakukan

perubahan yang fundamental, yaitu perubahan mental.

Menjadikan lansia sejahtera lahir dan batin bukan tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab kita semua.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bontang, Jamila Suyuthi mengatakan, pada prinsipnya kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk merefreshing kapasitas kader, kemampuan kader, dan ini merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Ini juga sekaligus momen memperingati hari lansia.

"Untuk kadernya pun dipilih langsung oleh masing-masing kelurahannya, jadi ketika setiap kelurahan menugaskan kader tersebut mereka sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Saat ini yang hadir ada sekitar 93 kader lansia," ucapnya.

Dengan penuh harapan, para kader bisa saling membagi ilmunya satu sama lain, menjadi motivasi, menjadi penyemangat untuk pelayanan di lapangan. Karena, tugas pemerintah meluaskan jangkauan pelayanan, dan kader pun menjadi ujung tombak di masyarakat. (dwi/adv)



dr Suhardi dan para jajaran RSUD Bontang, beserta tamu kunjungan dari RSUD Kerang Paser. (Dwi)

Lakukan Kaji Tiru SIMRS, RSUD Kerang Paser Kunjungi RSUD Bontang

BONTANG - RSUD Kerang Kabupaten Paser berkunjung ke RSUD Taman Husada Bontang, Rabu (25/10/2023) bertempat di Ruang Rapat, Lantai 4, Gedung B RSUD Bontang. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan Kaji Tiru mengenai Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi Sp.Jp, menjelaskan, kunjungan tersebut diikuti para staf dan pegawai RSUD Kerang Kabupaten Paser.

"Kami sudah mengembangkan digitalisasi, dimana pelayanan akan sangat mudah dan cepat. Ini sudah berjalan selama 4 tahun," ucapnya.

Sekarang pun, semua pelayanan bisa digunakan secara online, mulai dari pendaftaran

mandiri, nama antrean saat ingin melakukan pemeriksaan ke dokter, bahkan nomor antrean untuk melakukan pengambilan obat. Semuanya sudah dilakukan secara online.

"Sistem sekarang tidak perlu capek-capek dan berlama-lama untuk menunggu. Dengan sistem online ini kita bisa tau, bahkan nantinya kita akan mendapatkan pemberitahuan jika sudah giliran kita. Sekarang mau di tinggal terlebih dahulu tidak apa-apa," paparnya.

Dr Suhardi juga menjelaskan kepada para staf dan pegawai RSUD Kerang Kabupaten Paser, mengenai manajemen pelayanan rumah sakit secara digitalisasi di poli klinik rawat jalan. Menjelaskan secara rinci bagaimana alur pelayanan di klinik rawat jalan dengan sistem digital yang lebih cepat. (dwi/adv).



dr Jayadi Festiawan, Sp.PK saat memperlihatkan tempat khusus kantong darah. (Yahya Yabo)

Bank Darah RSUD Bontang, Layani Transfusi 150 Kantong Setiap Bulannya

BONTANG – Di RSUD Taman Husada Bontang tersedia Bank Darah yang didapat dari stok Palang Merah Indonesia (PMI) Bontang. Bank Darah RSUD Bontang dapat melayani kebutuhan transfusi darah 100 hingga 150 kantong darah setiap bulannya.

Penanggung Jawab Bank Darah RSUD Taman Husada Bontang, dr Jayadi Festiawan, Sp.PK menjelaskan, unit Bank Darah RSUD Bontang berdiri untuk memenuhi kebutuhan darah pasien di RSUD Taman Husada Bontang. Bank Darah hanya menerima limpahan dari PMI Bontang. Hanya menyimpan darah dan tidak menerima donor.

"Kami tidak melayani donor. Semuanya ada di PMI. Kami hanya menyimpan. Jangka waktunya darah selama 1 bulan setelah diambil dari PMI. Kami perkirakan rata-rata pemakaian darah satu bulan," kata dr Jayadi Festiawan, Sp.PK, Rabu (25/10/2023).

Selanjutnya, Ia mengatakan permintaan golongan darah yang paling banyak dibutuhkan pasien yakni

golongan darah O.

Ketersediaan darah di Bank Darah untuk batas waktu penyimpanan darah maksimal disimpan dalam waktu satu bulan untuk penggunaannya.

"Waktu yang aman digunakan untuk darah yang disimpan selama satu bulan setelah pengambilan darah (donor darah)," jelasnya.

"Kami juga melihat daya tampung kulkas (khusus pendingin darah) kami di sini dan memperkirakan pemakaian waktu pendek yakni seminggu yang bisa dibutuhkan 10-15 kantong darah setiap jenis golongan darah," imbuhnya.

Diinformasikan, bahwa Bank Darah Rumah Sakit hanya ada dua di Kota Bontang, salah satunya yakni RSUD Taman Husada.

"Kalau yang lain by request (meminta) untuk pemakaian kebutuhan darah ketika meminta langsung pakai. Kalau BDRS itu memang khusus untuk mendukung rumah sakit dimana BDRS berdiri," ungkapnya. (adv/yah)

Adrofdita Beber Skenario Pembangunan Bontang Pasca Migas: Maksimalkan Sumberdaya Lokal hingga Pengembangan Wilayah

BONTANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang Adrofdita mengungkapkan, bahwa Kota Bontang sebagai amanat otonomi daerah, masih sangat bergantung pada porsi transfer dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam rangka menuju kemandirian, maka kota ini harus mempertimbangkan dua skenario besar yang penting untuk dikerjakan oleh Pemkot Bontang.

Skenario 1: Memaksimalkan Sumberdaya Lokal

Untuk menghadapi masa pasca Migas, Pemkot Bontang perlu menjalin kerjasama resmi dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC), Badak NGL, dan Industri Migas dan Mineral (IMM) untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

A. Bidang Pendidikan.

Memanfaatkan instalasi, tenaga ahli serta managerial yang ada di PKT, Badak NGL, IMM, untuk menciptakan Bontang:

Sebagai sentra pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi bidang Industri Hilir & Pengolahan Gas Bumi, serta Pendidikan Teknikal (Operator alat berat, Welder, Safety Officer).

Memperluas fasilitas magang mencakup lulusan Setingkat SMU-SMK hingga Perguruan Tinggi, baik lulusan yang "pintar hingga kurang pintar, termasuk juga yang disable".

Sasaran utamanya adalah menjadikan Bontang kiblat pendidikan khas dimaksud, tempat rujukan/studi banding dari luar Bontang, disamping penyediaan tenaga kerja spesifik yang siap kerja.

Dalam hal peningkatan minat baca dan literasi, dengan cara kolaborasi PKT, Badak NGL, IMM, berkontribusi langsung dalam membangun sistem perpustakaan berakreditasi A dalam bentuk percontohan, sebutlah misalnya dalam 2 tahun masing-masing 3 unit SMP, 3 unit SMU, 1 unit STM.

B. Bidang Pariwisata:

Kerjasama hingga didukung Peraturan Daerah (Perda):

Menjadikan Lapangan golf, Sintuk Golf dan Badak Golf, sebagai destinasi wisata Bontang, dikemas selain sarana olahraga rutin juga diselenggarakan event lokal dan



Adrofdita (kiri) bersama koleganya di DPRD Kota Bontang saat menghadiri Peringatan HUT Ke-24 Kota Bontang.

nasional terjadwal dan rutin.

Kolaborasi PKT, Badak NGL, IMM, mendesain hutan mangrove terpadu dan unik, dilanjutkan dengan membangun percontohan area wisata hutan mangrove unik tersebut di area terdekat masing-masing perusahaan tersebut, tersambung kesatuan lokasi wisata mangrove sebelahnya.

Memperkuat Area Wisata pulau Tihi-Tihi, Salangan dan Gusung, serta segera mewujudkan kerjasama dengan Pemprov Kaltim dalam membangun wisata Beras Basah.

Langkah-langkah di bidang Pendidikan, Pariwisata, dan Literasi akan mengakselerasi Bontang dalam memproduksi sumber daya manusia yang handal dan wisata unik, meningkatkan kunjungan dari luar ke Bontang, mendukung Bontang mandiri pasca migas, sekaligus juga sebagai penopang Bontang sebagai HUB IKN.

Lebih lanjut, Adrofdita berharap dengan payung kerjasama hingga bila diperlukan dibuat Peraturan Daerah dapat memberi energi bagi ketiga perusahaan tersebut untuk spesifik menyediakan anggaran khusus untuk membangun kedua bidang tersebut, sebagai dua agen pendukung menuju Bontang berkelanjutan pasca migas (sustainable city).

C. Pararel, antara lain guna mendukung A, B, dan C, Pemerintah Kota Bontang penting untuk segera menyiapkan "display" presentasi, untuk melobi Pemprov Kaltim hingga Pusat untuk kembali memasukkan Jalan Tol Samarinda-Bontang sebagai Proyek Prioritas Nasional (diharapkan sudah terbangun dalam lima tahun ke depan).

Skenario 2: Pengembangan Wilayah den-

gan Kerjasama KUTIM dan KUKAR.

Skenario ini berangkat dari asumsi bahwa: Dari timur ke barat, Bontang-Muara Koman-Ujoh Bilang bisa tersambung via Jalan Darat (plus jembatan).

Di Wilayah Kukar dimaksud telah berkembang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perkebunan Sawit (Sumber Daya Alam terbarukan).

Di Wilayah Kutim dimaksud, saat ini berada terjepit antara area HTI dan Perkebunan Sawit di Barat dan di timur dengan Kota serta Pelabuhan Bontang, maka dengan perubahan Hutan konversi ke Areal Penggunaan Lain (APL), akan bisa menjadi area HTI dan perkebunan sawit (sumber daya alam terbarukan) dan sebagian timur sebagai area pemukiman. Jika tidak seluruhnya, maka sebagian area yang di APL kan sudah mencukupi untuk jalannya skenario ini.

Bontang akan menjadi area industri hilir dan pelabuhan yang bisa dijangkau oleh bahan baku dari area Kukar dan Kutim dalam waktu relatif pendek (beberapa jam saja) yang sudah barang tentu waktu tempuh pendek ini menjadi daya tarik investasi hilirisasi hingga ekspor hasil industri dari bahan baku HTI dan sawit.

"Perlu kerjasama serius dan sistematis untuk Bontang-Kukar-Kutim bisa mewujudkan hal tersebut. Sudah barang tentu dengan tujuan Sustainable Country menguntungkan semua pihak secara proporsional, bisa tanpa harus merubah status dan batas wilayah, dan teristimewa hal ini akan menjadikan Bontang Sustainable City," pungkask Adrofdita yang juga anggota Komisi I DPRD Bontang. (MK)

Mampukah Selesaikan Masalah Masyarakat dengan Segudang Prestasi?

Bontang dinobatkan menjadi daerah pertama sebagai Kota Pancasila di Indonesia. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Pemkot Bontang bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengapresiasi hal tersebut, karena Kota Bontang merupakan satu-satunya daerah pertama melakukan MoU bersama BPIP, dalam rangka pembinaan ideologi di pemerintah.

Kepala Dinas Kembangpol, Sigit Alfian mengungkapkan, Kota Bontang dipilih sebagai Kota Pancasila, karena Bontang dinilai menjadi kota yang kondusif, memiliki latar belakang suku, budaya, dan agama yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan dengan tentram.

Setelah dilakukan penandatanganan MoU, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan membunikan Pancasila. Penguatan dan pembinaan ideologi bagi aparatur sipil negara di Kota Bontang. (Radar Bontang 11/10/2023).

Sederet Penghargaan Diraih Kota Bontang Dalam kurun tahun 2023, Kota Bontang banyak meraih penghargaan, di antaranya: penghargaan Merdeka award 2023 di Auditorium SCTV Tower Lantai 8 Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Dalam waktu yang bersamaan, Bontang kembali meraih Merdeka Awards 2023 pada kategori program inovatif pendampingan UMKM. Penghargaan tersebut didapat karena inovasi-inovasi yang diberikan pemerintahan Kota Bontang untuk masyarakat.

Sebelum itu pada Sabtu 22 Juli 2023 di Hotel Padma Semarang Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 untuk kategori Nindya.

Masih di tahun yang sama di Bulan Januari, sederet prestasi telah dicapai. Keberhasilan tersebut antara lain pada Bidang Pencegahan Korupsi, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kepemudaan, Bidang Hilirisasi Peternakan, Bidang Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Penyelenggaraan Air Minum, Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Penanganan Disabilitas. (Dis-kominfo Prov. Kaltim 09/01/2023).

Berdasarkan Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang ber-

tentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. (Detiknews 26/05/2023).

Bontang memang layak mendapatkan penghargaan sebagai kota pancasila. Mengingat kota ini dihuni oleh sebagian besar penduduk dari luar daerah dengan berbagai suku, namun hidup rukun berdampingan. Keberhasilan ini sebagai tindak lanjut dari program kampanye moderasi yang telah dilaksanakan di Bulan Juli tahun 2023.

Sebagai Kota Industri, Bontang Punya Daya Tarik.

Kerukunan tercipta dengan banyaknya suku dari berbagai daerah di nusantara. Terbentuklah komunitas untuk mengeratkan ukhuwah dengan ikatan kesukuan. Pendatang terbanyak didominasi oleh suku Bugis, Jawa dan suku dari kalimantan.

Namun, kerukunan yang tercipta bukanlah semata-mata karena mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Adanya pepatah bijak yang mengatakan "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung", seolah menegaskan bahwa dimanapun kita berada harus bisa menempatkan diri. Namun nilai-nilai luhur sesungguhnya lahir dari penanaman agama yang kuat.

Dari Sinilah Tercipta Kehidupan Rukun dan Damai.

Banyaknya prestasi yang diraih Kota Bontang tentu membuat bangga masyarakat setempat, terutama para pejabat kota dan jajarannya. Namun, perlu dicermati bahwa sederet penghargaan yang diraih, apakah sudah berkorelasi dengan keadaan masyarakat saat ini?. Mengingat masih banyak permasalahan rakyat mulai dari kenakalan remaja, tingkat kriminalitas menghiasi laman media, narkoba dan kapasitas lapas yang tidak memadai, angka pengangguran yang terus naik sehingga berimbas pada kemiskinan, pendidikan dan kesehatan tidak kunjung usai.

Walau pemerintah mengklaim bahwa semua problem yang dialami oleh masyarakat telah diatasi, kenyataannya masalah umat tidak mampu diurai akibat solusi yang ditawarkan tidak sampai ke akar masalah. Torehan prestasi yang dicapai hanya menjadi bukti bahwa ada aksi yang telah dilakukan oleh Pemda setempat.

Selain itu, seolah terjalin kerjasama dan harmoni yang baik bahwa Pemerintah pusat dan daerah seiya sekata dalam melaksanakan program untuk kepentingan mas-



Oleh:

Hafsa

(Pemerhati Masalah Umat)

asyarakat.

Kenyataannya, ide-ide berikut program yang dicanangkan hanyalah cara untuk mengalihkan umat dari persoalan utama, yaitu penjajahan dalam bentuk pemikiran.

Seyogyanya, umat yang mayoritas beragama Islam maupun yang agama minoritas lebih ditekankan untuk mengamalkan ajaran agamanya. Bahkan, syariat Islam justru lebih mampu merefleksikan pengamalan dalam pancasila. Dari amalan yang benar akan melahirkan

sikap yang bijak tanpa perlu penghargaan.

Pada prakteknya, kerukunan dan toleransi mampu terealisasi ketika setiap insan siap menerima perbedaan baik dari segi perasaan, kebiasaan, agama maupun budaya tanpa harus menjadi pancasilais sejati.

Islam adalah agama yang sempurna, dari ajarannya lahir sikap, sifat dan aturan yang mengikat penganutnya. Maka Islam pantas disebut ideologi karena mempunyai aturan mendasar yang dapat diaplikasikan, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun negara.

Penganutnya harus yakin bahwa sang pencipta sudah tentu menurunkan pedoman atau aturan bagi makhluk ciptaanNya agar tidak tersesat. Keyakinan ini membuahkan keimanan yang terlihat dari sikap hambanya.

Dalam sejarahnya, umat Islam muncul di Jazirah Arab yang dibawa oleh Rasulullah Saw hidup berdampingan dengan para penganut agama samawi. Hingga penerus beliau yang setiap masanya dipimpin oleh seorang Kholifah tetap mengamalkan kerukunan antar suku dan bangsa hingga tercipta toleransi tanpa perlu pengakuan. Al Qur'an telah mengabadikan Firman Allah SWT yang artinya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

(TQS. Al-Hujurat 49: Ayat 13).

Sikap toleransi akan terwujud dengan mengamalkan seluruh aturan Allah SWT. Dengan penanaman akidah yang benar lahir sikap pemikiran yang baik dari tiap individu yang akan menyebar di tengah masyarakat. Negara kemudian berperan melindungi dan menjaga keamanan bagi rakyat dengan sistem yang sohih pula, yaitu sistem Islam.

Wallahu a'lam bishowab

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI KAMIS
26 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



UJI KESIGAPAN DARURAT SKALA BESAR,

KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN GELAR MAJOR EMERGENCY DRILL



**11 PROVINSI IKUTI ALKI
II ZONE INVESTMENT FORUM
2023 DI BALIKPAPAN**

UJI KESIGAPAN DARURAT SKALA BESAR, KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN GELAR MAJOR EMERGENCY DRILL

BALIKPAPAN - Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan melakukan Major Emergency Drill Level 2 (Simulasi Keadaan Darurat Skala Besar) pada Rabu (25/10/2023).

General Manager PT KPI Unit Balikpapan Arafat Bayu Nugroho mengatakan, skenario keadaan darurat tahun ini disimulasikan sebanyak 3 tangki minyak terjadi flash akibat sambaran petir yang kemudian disusul dengan lepasnya minyak dan asap tebal ke pemukiman warga. Simulasi skala besar ini melibatkan sekitar 400 orang baik dari internal Pertamina, Pemerintah Kota dan juga masyarakat.

"Ini Major Emergency Drill Level 2 yang rutin kami lakukan setiap tahun. Ini bagian dari kepatuhan kita terkait dengan aspek safety dalam mengoperasikan kilang kita yang penuh dengan risiko. Tahun ini dengan case berbeda dari tahun sebelumnya, karena lokasi tangki yang sekarang lebih dekat dengan fasilitas umum di Jalan Yos Sudarso (Jalan Minyak), khususnya perkantoran PT Pertamina Patra Niaga (PPN)," ujarnya.

Lebih lanjut Bayu menjelaskan, bahwa dekatnya fasilitas tangki dengan fasilitas umum memerlukan koordinasi yang lebih intensif. Di mana dibutuhkan koordinasi yang intensif, khususnya pengendalian dampak sosial ke masyarakat.

"Penutupan jalan minyak tadi sudah kita simulasikan dan evakuasi kurang lebih total 96 orang, 66 pekerja dari dalam kilang dan 30 warga masyarakat ini menjadi perhatian kita Bersama," jelasnya.

Warga yang terlibat dalam skenario tahun ini merupakan warga Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah. Proses evakuasi warga dilakukan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Warga dibawa menuju ke muster point yang be-



Major Emergency Drill Level 2 (Simulasi Keadaan Darurat Skala Besar) yang dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan pada Rabu (25/10).

rada di belakang kantor besar PT KPI Unit Balikpapan.

"Mudah-mudahan ini menjadi bekal khususnya bagi warga yang berada di sekitar wilayah operasional kita agar selalu siap dan waspada untuk segala kondisi emergency. Jadi warga itu paham apa yang harus mereka lakukan, melapor ke siapa dan alur evakuasi itu seperti apa," tambahanya.

Major Emergency Drill Level 2 pada PT KPI RU V Balikpapan ini, perlu dilakukan sebagai latihan upaya preventif atau pencegahan keadaan darurat. Tentunya tidak hanya memastikan peralatan siap digunakan namun juga para pekerja sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) juga wajib dilatih untuk dapat mengatasi keadaan emergency pada kilang secara tepat.

Selain memberikan perhatian kepada warga masyarakat, Bayu juga memfokuskan pada pekerja lintas subholding Pertamina Group.

"Termasuk juga dengan pekerja kita. Mudah-mudahan dengan ini kita selalu siap dengan kondisi emergency walaupun itu tidak kita harapkan. Pada kesempatan drill ini juga kami melakukan exercise (latihan) MOU Penanggulangan Keadaan Darurat yang sudah kami tanda tangani Bersama antara PT KPI Unit Balikpapan, Kilang Pertamina Balikpapan, PPN, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur

dan Pertamina Hulu Sanga-sanga untuk penanggulangan bersama saat kondisi emergency," tegas Bayu.

Selain bekerjasama dengan Pertamina Group Kalimantan, PT KPI Unit Balikpapan juga berkolaborasi dengan BPBD Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota, Kelurahan Karang Jati hingga kelompok masyarakat Kampung Tanggap Bencana (Katana) Karang Jati, mitra binaan PT KPI Unit Balikpapan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kelurahan Margasari dan Baru Tengah.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Balikpapan, Ely Chandra Peranginangin menambahkan, keikutsertaan KSB Margasari dan Baru Tengah pada simulasi ini untuk memberikan percontohan bagi Katana Karang Jati yang baru saja terbentuk awal bulan ini.

"Momen ini juga akan meningkatkan sinergitas antar masyarakat yang berada di sekitar kilang untuk saling berbagi kemampuan," ujar Chandra.

Dalam simulasi kali ini, KSB berperan dalam pelayanan di posko pengungsian. KSB berperan mendirikan tenda darurat untuk pengungsian. Keikutsertaan KSB juga untuk tetap melatih kewaspadaan dan keahlian mereka.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto memimpin Apel Pagi seluruh personil polri dan ASN dilingkup Polda Kaltim yang berlangsung di Lapangan Mapolda Kaltim, Rabu (25/10/2023).

PIMPIN APEL PERDANA, KAPOLDA KALTIM BERI ARAHAN KE SELURUH PERSONEL POLRI DAN ASN

BALIKPAPAN - Mengawali kepemimpinannya sebagai Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto memimpin Apel Pagi seluruh personel Polri dan ASN di lingkup Polda Kaltim yang berlangsung di Lapangan Mapolda Kaltim, Rabu (25/10/2023).

Dalam arahnya, Kapolda Kaltim meminta kepada seluruh personel jajaran Polda Kaltim agar dapat menjaga nama baik institusi Kepolisian, baik dari ucapan maupun perilaku saat bertugas di lapangan.

"Kepada seluruh personel untuk bekerja secara maksimal dalam hal pelayanan kepada masyarakat, mengingat saat ini Polri tengah menjadi sorotan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Kapolda Kaltim menjelaskan, bersamaan itu, ia juga berharap sinergitas dan disiplin yang selama ini sudah dibangun tetap di pertahankan. Jika perlu harus ada pening-

katan, sehingga pelaksanaan tugas pun lebih maksimal guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Kaltim.

"Saya datang kesini untuk bekerja, hargai dan hormati pekerjaanmu maka tugas akan berjalan dengan baik-baik saja," jelasnya.

Selanjutnya Jenderal Bintang Dua ini juga berpesan kepada seluruh personel agar menjaga sinergitas terhadap instansi yang lain, termasuk TNI dan PEMDA serta stakeholder yang lainnya.

Dalam Apel Pagi ini dihadiri pula oleh Waka-polda Kaltim Brigjen Pol Mujiyono, Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Zulkifli, dan para pejabat utama Polda Kaltim.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud bersama Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik usai membuka ALKI II Zone Investment Forum 2023, di Hotel Jatra Balikpapan.

11 PROVINSI IKUTI ALKI II ZONE INVESTMENT FORUM 2023 DI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Forum Investasi Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II atau ALKI II Zone Investment Forum 2023 resmi di buka oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan didampingi Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud di Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (25/10/2023)

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan dipilih sebagai tuan rumah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Hasbullah Helmi mengatakan, pada hari ini puncak kegiatan dengan diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan seminar, bisnis meeting dan gala dinner bagi peserta investor yang hadir dan undangan.

"Kegiatan ini bertujuan mengundang para investor dan daerah-daerah yang ada di sekitar ALKI II, yang di dalamnya ada 11 Provinsi dan 188 Kabupaten/Kota," ujarnya.

Lebih lanjut Helmi menjelaskan, adapun 11 Provinsi ini memiliki Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang di mana investasi yang ada IPRO-nya sudah clean and clear, sehingga investor tinggal masuk berinvestasi di bidang apa saja.

"Istilahnya kami buat supermarket investa-

si "jualan bersama" tidak lagi masing-masing daerah membuka jualan sendiri," jelasnya.

Pemerintah daerah juga ingin jalur ini semakin ramai, yang selama ini perdagangan banyak melewati ALKI I di Selat Malaka. Sehingga diharapkan ALKI II yang melintasi Selat Makassar bisa ikut ramai dengan negara tujuan ke arah utara seperti Korea, Jepang, dan Cina.

"Di satu sisi juga ada berkah dari adanya IKN. Di Sulawesi juga dekat, di mana Kota Balikpapan butuh pangan, kita bisa bekerjasama dengan daerah di pulau Sulawesi sehingga sama-sama perekonomian meningkat," tambah Helmi.

Hasbullah Helmi menegaskan, ada 11 Provinsi yang diundang. Sejauh ini sejumlah Gubernur juga menginformasikan kehadirannya. Sementara untuk Kabupaten/Kota yang diundang adalah mereka yang memiliki IPRO. Total ada 14 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki IPRO.

"Nah, untuk perusahaan atau investor ada 150 yang telah menginformasi hadir. Mereka dari dalam dan luar negeri," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS

26 OKT 2023



SEKRETARIAT DPRD SE-KALTIM GELAR RAKOR DI PASER

**BELUM HITUNGAN SETAHUN, LANTAI
ATAS KONTAINER WISKUL RUSAK**





Jajaran Sekretariat DPRD se Kaltim

SEKRETARIAT DPRD SE-KALTIM GELAR RAKOR DI PASER

PASER - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten/Kota se Kaltim menggelar Rapat koordinasi (Rakor) di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Selasa (24/10/2023).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Iskandar Zulkarnain, memberikan pemaparan terkait strategi peningkatan kinerja DPRD, melalui optimalisasi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

"Hari ini adalah momen yang sangat penting, sehingga saya bisa mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder DPRD se Kalimantan Timur mengenai bentuk ideal tugas dan fungsi DPRD," kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, semua bentuk fasilitasi terhadap DPRD harus berorientasi pada tiga fungsi utama DPRD, sehingga tidak ada fasilitasi yang tidak memiliki kaitan dengan tiga fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran.

Ia berharap, koordinasi ini dapat dilakukan lebih sering untuk menemukan format baku

dalam mendukung tugas DPRD. Selain itu, ia menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Kepala Daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

"Konsepnya sudah berbeda dari konsep yang lama, bukan lagi konsep eksekutif dan legislatif terpisah, melainkan keduanya telah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah," jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan proses tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD agar berdampak pada capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

"Tugas ini tidak mudah, karena harus dapat memetakan kepentingan-kepentingan pemerintah daerah dalam mencapai target RPJMD dan harus diselaraskan dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD," terangnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Booth kontainer di Kawasan Wisata Kuliner Sungai Tuak butuh perbaikan.

BELUM HITUNGAN SETAHUN, LANTAI ATAS KONTAINER WISKUL RUSAK

PASER - Kawasan wisata kuliner (Wiskul) Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot yang diresmikan Maret 2023 lalu, sudah dikeluhkan pedagang booth kontainer. Pasalnya, sebulan setelah diresmikan atau sejak April telah banyak kerusakan.

Antara lain, seperti tempias air hujan, bagian atap yang berbahan plywood mulai hancur atau rusak. Tak ayal, kondisi ini membuat pedagang was-was. Diketahui Kawasan Wiskul ini terdapat 60 booth kontainer, dan 40 di antaranya bertingkat atau dua lantai.

"Kami khawatir bagaimana jika kerusakan semakin parah dan akan ini akan semakin tidak membuat nyaman pembeli," ucap Ketua Paguyuban Pedagang Wiskul Sungai Tuak, Zulkifli, Selasa (24/10/2023) malam.

Khusus bagian atap booth kontainer yang berbahan plywood mulai bolong-bolong. Sementara di lantai 2 disediakan tempat duduk dan meja untuk pembeli. Namun kondisi yang ada sekarang ini dikatakannya sangat riskan dan mengkhawatirkan.

"Playwood ini mau sampai ka-

pan bertahannya. Sudah menahan panas dan hujan serta orang duduk di atasnya," sambungnya.

Sejatinya persoalan itu pernah disampaikan ke Disporapar yang awalnya secara lisan. Dikatakannya, penjual takut berjualan dengan kondisi kerusakan yang terdapat di booth kontainer berukuran 3x6 meter itu.

Karena tidak ada tindak lanjut dari penyampaian secara lisan untuk diperbaiki, pedagang kemudian bersurat yang ditujukan ke bupati Paser, DPRD Paser dan Disporapar. Alhasil dilakukan pertemuan, namun upaya itu juga tak membuahkan hasil seperti harapan pedagang.

"Kalau memang kami menganggap ini enggak kritis, kami tak segetol ini untuk dilakukan pertemuan saat itu. Ya, katanya mau diperbaiki cuma sampai sekarang tidak ada realisasinya," keluh Zulkifli.

Karena tak ada tanda-tanda diperbaiki, tak ingin terjadi kerusakan di booth kontainer yang lebih parah, pedagang terpaksa mengeluarkan duit pribadi untuk melakukan perbaikan. Nomi-

nalnya bervariasi berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.

"Kalau ini (booth container) rusak parah dan ada insiden siapa yang tanggung jawab. Jangan sampai ada korban baru diperbaiki," ketusnya.

Padahal kata Zulkifli, pedagang yang berjualan setiap bulannya membayar retribusi yang disetor kepada pengelola Kawasan Wiskul Sungai Tuak. Nominalnya Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu.

"Kalau kontainer dua lantai retribusinya Rp 600 ribu per bulan. Jadi kami minta ini dapat diperbaiki," tegas Zulkifli.

Salah seorang pembeli, Irma menyangkan kondisi booth kontainer telah banyak mengalami kerusakan. Menurutnya, awal kehadiran Wiskul Sungai Tuak menjadi tempat favorit kawula mudah hingga orang dewasa.

"Di lantai dua booth kontainer ini juga sudah enggak rata, seperti kita injak seng, riskan juga. Semoga segera diperbaiki dengan maksimal," harap Irma.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS
26 OKT 2023



LLAGUM 2023, IMPLEMENTASI KEMAJUAN TEKNOLOGI DALAM PEMBINAAN KARAKTER GERAKAN PRAMUKA

**MUDA
BERAHLAK
AMANA
DINAMIS**

A portrait of Arie Wibowo, a man wearing a yellow blazer and a black peci, standing against a yellow background.

**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

A circular logo with the letters 'AW' in yellow and the name 'ARIE WIBOWO' in white.



Foto bersama seluruh peserta, pembina, dan tamu undangan

LLAGUM 2023, IMPLEMENTASI KEMAJUAN TEKNOLOGI DALAM PEMBINAAN KARAKTER GERAKAN PRAMUKA

SAMARINDA - Sebanyak 250 peserta dan tamu undangan hadir dalam upacara pembukaan kegiatan Lomba Lintas Alam Gugus Depan Universitas Mulawarman pada Rabu (25/10/2023) di GOR 27 September, Universitas Mulawarman. Acara ini diibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Lambang Subagyo yang mewakili Rektor Universitas Mulawarman.

Lambang Subagyo yang juga selaku jajaran Mahasiswa Pramuka Universitas Mulawarman menilai bahwa Gerakan Pramuka masih menjadi andalan di republik ini. Karena semua asas kehidupan dari zaman kolonial hingga milenial saat ini masuk pada era digital ada pada Dasa Dharma Pramuka.

"Saat ini Gerakan Pramuka masuk ke dalam era baru digital sehingga gerakan Pramuka tidak lepas dari gerakan kekinian meskipun adat yang dipakai adalah adat-adat yang selalu dan tentunya tetap relevan di segala zaman" kata Lambang Subagyo saat membawakan amanat upacara.

Lebih lanjut, Lambang Subagyo mengatakan bahwa Mahasiswa dan pelajar saat ini harus berkembang dalam pemodelan scientific di antara science, technology, engineering, dan mathemathic. Sehingga Pramuka tidak kalah dalam hal teknologi yang saat ini di implementasikan dalam kegiatan ini yaitu teknologi tepat guna, yang nantinya akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi dewasa nanti ketika menjadi penentu kebijakan republik ini.

"Dengan adanya kemajuan teknologi tentu ada perubahan karakter. Karakter digital saat ini, atau digital native yang merupakan ancaman kita, dengan adanya Dasa Dharma Pramuka, mari kita pegang teguh nilai norma Pramuka untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan karakter yang kita miliki," tutupnya.

Diketahui kegiatan LLAGUM merupakan salah satu kegiatan Pramuka bergengsi tingkat Penegak di Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh UKM

Pramuka Universitas Mulawarman. Yaitu, kegiatan perlombaan lintas alam dan beberapa cabang lomba diantaranya Teknologi Tepat Guna, Miniatur Pioneering, Rangking 1, Poster, String Art, Film Pendek, dan E-Sport, dengan tema "Bersinergi Tanpa Batas, Menciptakan Pramuka yang Kreatif dan Inovatif."

Diikuti 215 peserta dari 7 kabupaten-kota di Kalimantan Timur, berpusat di GOR 27 September, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Pewarta : M Nuzul Saputra

Editor : Nicha Ratnasari



Penyematan tanda peserta oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun (ist)

WAKIL KETUA DPRD KALTIM INGATKAN KEWAJIBAN REKLAMASI SEBELUM ALIH FUNGSI LAHAN

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun ingatkan pengusaha pertambangan batu bara untuk memenuhi kewajibannya yakni reklamasi pasca tambang sebelum dilakukan alih fungsi lahan.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, fenomena yang terjadi di Bumi Etam banyak perusahaan yang enggan melakukan reklamasi. Malahan lubang yang dibiarkan menganga dijadikan tempat wisata.

Padahal menurutnya pengusaha batu bara semestinya mengembalikan dulu fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya. Barulah lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain seperti pertanian, peternakan maupun pariwisata.

"Dikembalikan dulu seperti semula, hal itu jadi tanggung jawab perusa-

haan. Mungkin karena harus bayar bermilyar-milyaran makanya berpikir lepas tangan," tegasnya (25/10/2023).

Sebenarnya menurut Samsun, lahan pasca tambang bisa saja langsung dimanfaatkan, misal digunakan untuk sektor pertanian. Namun butuh upaya keras untuk mengelolanya dan juga biaya yang besar. Musabab ada lubang-lubang tambang di area tersebut yang tentunya harus ditutup oleh para petani.

"Harus menyehatkan tanah itu, dan juga memerlukan biaya yang besar dalam pengelolaannya. Sedangkan petani tak bisa melakukan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Itu jadi tanggung jawab perusahaan bukan para petani, 'kan ada itu jamrek," pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono

OPTIMALKAN KAWASAN INVESTASI DI KALTIM, SAPTO DORONG PEMPROV TAWARKAN KEMUDAHAN INVESTOR

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono berharap pemerintah daerah mengawal optimalisasi investasi potensial di Kaltim. Ia mendorong promosi dan kompensasi yang menarik, agar bisa menggaet para investor.

Sapto berharap Pemprov Kaltim gencar mempromosikan kawasan industri dan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur, Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Penajam Paser Utara dan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan. Musabab kawasan - kawasan belum maksimal menarik investor menanamkan modalnya.

"Kawasan ini kan sudah dicanangkan. Tinggal bagaimana menggaet mereka (investor) mau masuk ke kita, kasih apa, fasilitasnya bagaimana?," jelasnya, Kemarin, Selasa (24/10/2023).

Promosi yang ditawarkan sebut Sapto bisa dilakukan berbagai cara. Salah satu

nya menurutnya, Pemprov dapat menawarkan kemudahan-kemudahan dalam investasi.

"Dengan kemudahan apa? Kompensasi apa, diskon apa yang diberikan. Korelasinya dengan pajak juga. Anggap saja selalu berinvestasi 1-2 tahun, dikasih kompensasi. Tahun ketiga baru dikasih pajaknya. Tinggal skemanya bagaimana," terangnya.

Lebih lanjut politisi ini menerangkan, optimalisasi yang dimaksud termasuk penggunaan alat, kendaraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah proyek investasi. Agar tak hanya aspek investasi yang menjadi keuntungan yang diperoleh Kaltim.

"Misalnya, ada pihak yang mau berinvestasi di Kaltim. Ya kendaraan dan alat berat yang dipakai harus berplat KT, harus dari Kaltim," tutupnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Provinsi Kaltim Fitri Maysaroh

LEGISLATOR PKS INI DORONG PARTISIPASI PEREMPUAN MENINGKAT PADA PEMILU 2024

SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kaltim Fitri Maysaroh mendorong partisipasi perempuan meningkat di lembaga legislatif. Pasalnya, kehadiran perempuan dianggapnya sangat penting di berbagai aspek.

Sehingga menurutnya, penting untuk mengadvokasi agar perempuan hadir di berbagai aspek baik hukum, sosial, ekonomi dan politik.

"Perempuan penentu bangsa ini, kita harus memastikan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek," ujarnya beberapa waktu lalu.

Khususnya, pada kontestasi Pemilu 2024. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar perempuan aktif dalam kontestasi politik tahun depan.

"Pemilu 2024 perempuan harus mengambil peran untuk menentukan kehidupan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tak hanya mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Namun, keterlibatan "Srikandi" di kontestasi politik juga harus dibarengi kemampuan, dan kapabilitas yang mumpuni. Sehingga tak hanya menjadi pemanis semata atau sekedar memenuhi kuota partisipasi perempuan sebesar 30 persen.

"Harus punya kemampuan politik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Eky/ Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari